



**PENETAPAN**

**Nomor 85/Pdt.P/2019/PA Bitg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Azis Bahman**, NIK 7172071110680001, Tempat Tanggal Lahir Bitung, 11 Oktober 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Alamat Lingkungan II, RT 005, RW 002, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Mariam Amrain**, NIK 7172025803010001, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 23 Oktober 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Lingkungan II, RT 005, RW 002, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 85/Pdt.P/2019/PA Bitg. Tanggal 7 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2000 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan wali Nikah bernama Kadir Amrain (Ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2019/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama Ismail Jafar dan Abdurahim Tanibo dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Fajrin Bahman
  2. Fikran Bahman
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Buku nikah dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Bitung Barat Satu dengan Nomor 65/SKEL/BBS/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2019/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Azis Bahman**) dengan Pemohon II (**Mariam Amrain**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2000 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebaskan dari Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2019/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp0,- (nihil);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S. Ag.

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2019/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)